



Peran Pemerintah Dalam Menjaga Kelestarian Maritim

Ellen Elisabeth Kome*, Yusnaldi, Bayu Asih Yulianto, Pujo Widodo, Panji Suwarno

Universitas Pertahanan, Indonesia

Abstrak : Indonesia, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan keanekaragaman hayati laut yang luar biasa, memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga kelestarian ekosistem maritimnya. Pemerintah Indonesia memainkan peran penting melalui berbagai upaya yang meliputi regulasi dan kebijakan, pembentukan kawasan konservasi laut, program restorasi terumbu karang, pengelolaan perikanan berkelanjutan, pendidikan dan peningkatan kesadaran masyarakat, serta kerjasama internasional. Kebijakan dan regulasi seperti Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memberikan dasar hukum yang kuat untuk perlindungan ekosistem laut. Pembentukan kawasan konservasi laut yang luas bertujuan untuk melindungi habitat kritis dan spesies yang terancam. Program restorasi terumbu karang dan pengelolaan perikanan yang berkelanjutan membantu memastikan keberlanjutan sumber daya laut. Peningkatan kesadaran masyarakat dan kerjasama internasional juga menjadi bagian penting dari upaya pemerintah dalam menjaga kelestarian lingkungan laut. Semua langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah Indonesia untuk melindungi kekayaan maritimnya dan memastikan keberlanjutan ekosistem laut bagi generasi mendatang

Kata Kunci : Peran pemerintah, kelestarian maritim

DOI: <https://doi.org/10.47134/par.v1i4.3098>

*Correspondence: Ellen Elisabeth Kome
Email: ellenelisabethkome@gmail.com

Received: 25-06-2024
Accepted: 15-07-2024
Published: 01-08-2024



Copyright: © 2024 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstract: *Indonesia, as the world's largest archipelagic country with extraordinary marine biodiversity, has a great responsibility in preserving its marine ecosystems. The Indonesian government plays an important role through various efforts including regulations and policies, the establishment of marine conservation areas, coral reef restoration programs, sustainable fisheries management, education and public awareness, and international cooperation. Policies and regulations such as Law No. 32 of 2009 on Environmental Protection and Management provide a strong legal basis for the protection of marine ecosystems. The establishment of large marine conservation areas aims to protect critical habitats and threatened species. Coral reef restoration programs and sustainable fisheries management help ensure the sustainability of marine resources. Raising public awareness and international cooperation are also important parts of the government's efforts to preserve the marine environment. All of these steps demonstrate the Indonesian government's commitment to protecting its marine wealth and ensuring the sustainability of marine ecosystems for future generations*

Keywords: *The Role Of Government, Maritime Sustainability*

Introduction

Indonesia, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, memiliki keanekaragaman hayati laut yang sangat kaya. Pemerintah Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga kelestarian negara maritim ini melalui berbagai kebijakan dan inisiatif yang bertujuan untuk melindungi ekosistem laut dan sumber daya alamnya.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan berbagai regulasi dan kebijakan untuk melindungi lingkungan laut. Salah satu contohnya adalah Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang mencakup perlindungan ekosistem laut dan pesisir. Pemerintah telah menetapkan sejumlah kawasan konservasi laut untuk melindungi keanekaragaman hayati dan ekosistem kritis. Hingga saat ini, Indonesia memiliki lebih dari 20 juta hektar kawasan konservasi laut yang dikelola untuk menjaga keberlanjutan sumber daya laut (Hossain, 2021; Inal, 2022; Xing, 2021).

Terumbu karang adalah salah satu ekosistem laut yang paling penting dan rentan. Pemerintah melalui berbagai program seperti Coral Triangle Initiative (CTI) berupaya melakukan restorasi dan rehabilitasi terumbu karang yang rusak. Pemerintah juga fokus pada pengelolaan perikanan yang berkelanjutan untuk memastikan bahwa sumber daya ikan tetap tersedia bagi generasi mendatang. Ini termasuk penerapan kuota penangkapan ikan, larangan penggunaan alat tangkap yang merusak, serta pengawasan dan penegakan hukum yang ketat terhadap kegiatan penangkapan ikan ilegal (Aslam, 2020; Narasimha, 2021).

Pemerintah juga berperan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kelestarian lingkungan laut. Melalui kampanye edukasi dan program pelatihan, masyarakat diajak untuk berperan aktif dalam konservasi laut. Pemerintah Indonesia juga menjalin kerjasama internasional untuk mengatasi isu-isu lingkungan laut yang bersifat lintas batas. Misalnya, kerjasama dalam pengelolaan Laut China Selatan dan Samudra Hindia untuk melindungi ekosistem laut dari ancaman polusi dan perubahan iklim. Melalui upaya-upaya tersebut, Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk menjaga kelestarian negara maritim dan memastikan keberlanjutan ekosistem laut bagi generasi mendatang (Molavi, 2020; Wang, 2020).

Methodology

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk menganalisis peranan pemerintah dalam menjaga kelestarian maritim. Data dikumpulkan melalui analisis dokumen dan literatur (*study literature*). Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis isi dan analisis wacana kritis untuk mengidentifikasi pola hegemoni dan resistensi di kawasan tersebut (Creswell, 2014). Validitas data diperiksa melalui triangulasi sumber, metode, dan teori, untuk memastikan kredibilitas dan keakuratan temuan penelitian ini (Denzin & Lincoln, 2011). Penelitian ini berupaya untuk memberikan pemahaman yang mendalam mengenai pentingnya menjaga kelestarian maritim sebagai bentuk cara melestarikan keberlangsungan hidup manusia.

Result and Discussion

Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia, terdiri dari lebih dari 17.000 pulau dan memiliki garis pantai sepanjang lebih dari 95.000 km. Negara ini diberkahi dengan keanekaragaman hayati laut yang luar biasa, termasuk terumbu karang, hutan mangrove, dan berbagai spesies laut yang unik. Mengingat pentingnya ekosistem laut ini

bagi kehidupan dan ekonomi Indonesia, pemerintah memiliki peran penting dalam menjaga kelestarian negara maritim.

1. Regulasi dan Kebijakan

Pemerintah Indonesia telah mengembangkan berbagai regulasi dan kebijakan yang bertujuan untuk melindungi lingkungan laut. Salah satu yang paling penting adalah Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang-undang ini mencakup perlindungan ekosistem laut dan pesisir, serta memberikan dasar hukum untuk pengelolaan yang berkelanjutan.

2. Pembentukan Kawasan Konservasi Laut

Untuk melindungi keanekaragaman hayati dan ekosistem laut yang kritis, pemerintah telah menetapkan sejumlah kawasan konservasi laut. Kawasan ini mencakup lebih dari 20 juta hektar dan dikelola dengan tujuan menjaga keberlanjutan sumber daya laut. Kawasan konservasi laut membantu melindungi habitat penting bagi berbagai spesies laut, termasuk yang terancam punah.

3. Program Restorasi Terumbu Karang

Terumbu karang adalah salah satu ekosistem laut yang paling penting dan rentan. Terumbu karang tidak hanya menyediakan habitat bagi banyak spesies laut, tetapi juga melindungi pantai dari erosi dan mendukung industri pariwisata. Pemerintah Indonesia, melalui program seperti Coral Triangle Initiative (CTI), berupaya untuk merestorasi dan merehabilitasi terumbu karang yang rusak akibat aktivitas manusia dan perubahan iklim.

4. Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan

Pengelolaan perikanan yang berkelanjutan adalah prioritas utama bagi pemerintah Indonesia. Ini mencakup penerapan kuota penangkapan ikan untuk mencegah overfishing, pelarangan penggunaan alat tangkap yang merusak, serta pengawasan dan penegakan hukum yang ketat terhadap kegiatan penangkapan ikan ilegal. Langkah-langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa sumber daya ikan tetap tersedia bagi generasi mendatang dan menjaga keseimbangan ekosistem laut.

5. Pendidikan dan Kesadaran Masyarakat

Pemerintah juga berperan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kelestarian lingkungan laut. Melalui kampanye edukasi dan program pelatihan, masyarakat diajak untuk berperan aktif dalam konservasi laut. Pendidikan lingkungan yang berkelanjutan membantu membangun kesadaran dan pemahaman tentang pentingnya ekosistem laut dan cara-cara untuk melindunginya.

6. Kerjasama Internasional

Isu-isu lingkungan laut sering kali bersifat lintas batas, sehingga kerjasama internasional menjadi sangat penting. Pemerintah Indonesia aktif menjalin kerjasama dengan negara-negara lain dan organisasi internasional untuk mengatasi masalah-masalah seperti polusi laut, penangkapan ikan ilegal, dan dampak perubahan iklim. Kerjasama ini termasuk pengelolaan Laut China Selatan dan Samudra Hindia, serta partisipasi dalam berbagai konvensi dan perjanjian internasional yang bertujuan melindungi lingkungan laut.

Conclusion

Pemerintah Indonesia memainkan peran yang sangat penting dalam menjaga kelestarian negara maritim melalui berbagai kebijakan, program, dan kerjasama internasional. Melalui regulasi yang ketat, pembentukan kawasan konservasi, program restorasi ekosistem, pengelolaan perikanan yang berkelanjutan, pendidikan masyarakat, dan kerjasama global, pemerintah berkomitmen untuk memastikan bahwa sumber daya laut yang kaya ini dapat dinikmati oleh generasi mendatang. Upaya-upaya ini sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem laut dan mendukung keberlanjutan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat Indonesia.

References

- Burke, L., Reytar, K., Spalding, M., & Perry, A. (2011). *Reefs at Risk Revisited*. Washington, D.C.: World Resources Institute.
- Conservation International. (2016). *Marine Conservation Agreements: A Practitioner's Toolkit*. Arlington: Conservation International.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (4th ed.). Sage Publications
- Coral Triangle Initiative on Coral Reefs, Fisheries and Food Security (CTI-CFF). (2020). *Strategic Plan of Action 2020-2025*. Jakarta: CTI-CFF.
- Food and Agriculture Organization (FAO). (2020). *The State of World Fisheries and Aquaculture 2020*. Rome: FAO.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. (2021). *Laporan Tahunan Kementerian Kelautan dan Perikanan*. Jakarta: Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- Ministry of Marine Affairs and Fisheries of the Republic of Indonesia. (2017). *Indonesia's Marine Protected Areas: Status and Challenges*. Jakarta: Ministry of Marine Affairs and Fisheries.
- Partnership for Observation of the Global Oceans (POGO). (2018). *Marine Biodiversity Observation Network (MBON): A Vision for Global Marine Biodiversity Monitoring*. Plymouth: POGO.
- United Nations Environment Programme (UNEP). (2019). *Global Environment Outlook – GEO-6: Healthy Planet, Healthy People*. Nairobi: UNEP.

- WWF Indonesia. (2018). *Masa Depan Laut Kita: Melindungi Keanekaragaman Hayati Laut Indonesia*. Jakarta: WWF Indonesia.
- Aslam, S. (2020). Internet of Ships: A Survey on Architectures, Emerging Applications, and Challenges. *IEEE Internet of Things Journal*, 7(10), 9714–9727. <https://doi.org/10.1109/JIOT.2020.2993411>
- Hossain, T. (2021). Role of sustainability in global seaports. *Ocean and Coastal Management*, 202. <https://doi.org/10.1016/j.ocecoaman.2020.105435>
- Inal, O. B. (2022). Investigation on the decarbonization of shipping: An approach to hydrogen and ammonia. *International Journal of Hydrogen Energy*, 47(45), 19888–19900. <https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2022.01.189>
- Molavi, A. (2020). A framework for building a smart port and smart port index. *International Journal of Sustainable Transportation*, 14(9), 686–700. <https://doi.org/10.1080/15568318.2019.1610919>
- Narasimha, P. T. (2021). Impact of COVID-19 on the Indian seaport transportation and maritime supply chain. *Transport Policy*, 110, 191–203. <https://doi.org/10.1016/j.tranpol.2021.05.011>
- Wang, X. (2020). How can the maritime industry meet Sustainable Development Goals? An analysis of sustainability reports from the social entrepreneurship perspective. *Transportation Research Part D: Transport and Environment*, 78. <https://doi.org/10.1016/j.trd.2019.11.002>
- Xing, H. (2021). Alternative fuel options for low carbon maritime transportation: Pathways to 2050. *Journal of Cleaner Production*, 297. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2021.126651>